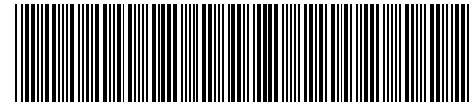




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408909/2024**



DS:6265-4307-7305-1300

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
  3. Provinsi : (25) PAPUA
  4. Kode/Nama Satker : (408909) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
- Sebesar : Rp. 955.110.000 ( SEMBILAN RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SERATUS SEPULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	955.110.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 955.110.000

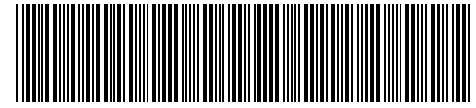
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2024**



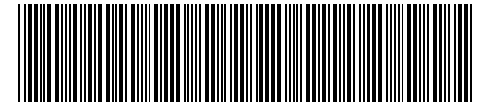
DS:6265-4307-7305-1300

Satker : (408909) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

---

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	128.825.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	128.825.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	826.285.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	826.285.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



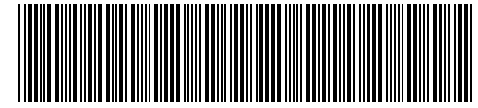
DS:6265-4307-7305-1300

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (408909) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Halaman : I A. 1

Program	: 013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			128.825.000
Kegiatan	: 5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			128.825.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan			
	: 2. 02	Jumlah fasilitas Perencanaan Perda			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	73.824.000
Rincian Output	: 01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	73.824.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 5256.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	55.001.000
Rincian Output	: 01 BDB.001	Fasilitas Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	55.001.000
Program	: 013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			826.285.000
Kegiatan	: 4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			826.285.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah			
	: 2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan/permintaan layanan bantuan hukum litigasi			
	: 3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap dari usulan kantor wilayah			
	: 4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan/permintaan layanan bantuan hukum non-litigasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 4841.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	8,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	83.131.000
Rincian Output	: 01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	8,00	Lembaga	83.131.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6265-4307-7305-1300

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (408909) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		7,00	Kelompok Masyarakat	152.502.000
Rincian Output		:	01	BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2,00	Kelompok Masyarakat	75.749.000
		:	02	BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	5,00	Kelompok Masyarakat	76.753.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	39.534.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	6,00	Lembaga	39.534.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.PDE	Akreditasi Lembaga		6,00	Lembaga, Unit Kerja	55.098.000
Rincian Output		:	01	PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (PN)	6,00	Lembaga	55.098.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		54,00	Orang	432.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	54,00	Orang	432.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		6,00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan	64.020.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	6,00	Kegiatan	64.020.000

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

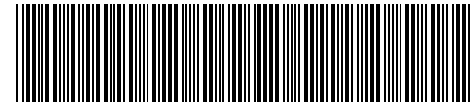
ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2024**

**I B. SUMBER DANA**



DS:6265-4307-7305-1300

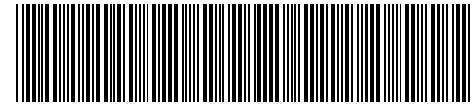
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Provinsi : (25) PAPUA  
 Kode>Nama Satker : (408909) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

				Pagu			Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	955.110.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	955.110.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6265-4307-7305-1300

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (408909) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408909	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA	-	955.110	-	-	-	955.110		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	128.825	-	-	-	128.825		
5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	128.825	-	-	-	128.825		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	73.824	-	-	-	73.824	25 . 51	
01	RM	-	73.824	-	-	-	73.824	063	
5256.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	55.001	-	-	-	55.001	25 . 51	
01	RM	-	55.001	-	-	-	55.001	063	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	826.285	-	-	-	826.285		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	826.285	-	-	-	826.285		
4841.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	83.131	-	-	-	83.131	25 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2024**

**II. RINCIAN PENGELUARAN**



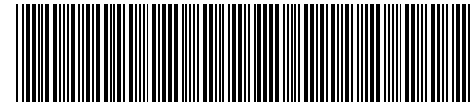
DS:6265-4307-7305-1300

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Provinsi : (25) PAPUA  
 Kode>Nama Satker : (408909) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA  
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	83.131	-	-	-	83.131	063	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	152.502	-	-	-	152.502	25 . 51	
01 RM		-	152.502	-	-	-	152.502	063	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	39.534	-	-	-	39.534	25 . 51	
01 RM		-	39.534	-	-	-	39.534	063	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	55.098	-	-	-	55.098	25 . 51	
01 RM		-	55.098	-	-	-	55.098	063	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	432.000	-	-	-	432.000	25 . 51	
01 RM		-	432.000	-	-	-	432.000	063	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6265-4307-7305-1300

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (408909) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	64.020	-	-	-	64.020	25 . 51	
01	RM	-	64.020	-	-	-	64.020	063	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>955.110</b>	-	-	-	<b>955.110</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6265-4307-7305-1300

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (408909) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

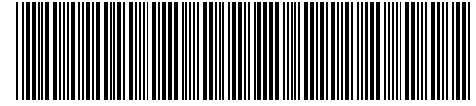
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408909	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	42.335	67.696	127.666	42.335	60.523	158.169	65.435	106.911	53.107	64.265	124.324	42.344	955.110
		<b>BELANJA BARANG</b>	42.335	67.696	127.666	42.335	60.523	158.169	65.435	106.911	53.107	64.265	124.324	42.344	955.110
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	23.836	74.559	0	7.330	0	23.100	0	0	0	0	0	128.825
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	23.836	74.559	0	7.330	0	23.100	0	0	0	0	0	128.825
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	42.335	43.860	53.107	42.335	53.193	158.169	42.335	106.911	53.107	64.265	124.324	42.344	826.285
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	42.335	43.860	53.107	42.335	53.193	158.169	42.335	106.911	53.107	64.265	124.324	42.344	826.285

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:6265-4307-7305-1300

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [25] PAPUA  
Kode dan Nama Satker : [408909] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

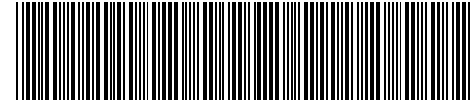
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:6265-4307-7305-1300

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [25] PAPUA  
Kode dan Nama Satker : [408909] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001